

MAKRO

Kemenkeu : Gedung Kejaksaan Agung Belum Diasuransikan

NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menyebutkan Gedung Kejaksaan Agung RI yang terbakar pada Sabtu (22/8) belum diasuransikan. "Gedung Kejaksaan Agung apakah diasuransikan atau tidak? Dalam catatan kami belum diasuransikan," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (25/8).

Isa menyatakan renovasi atau pembangunan kembali terhadap Gedung Kejaksaan Agung RI yang terbakar tersebut harus membutuhkan penganggaran baru dalam APBN karena untuk tahun ini tidak dianggarkan. "APBN tahun ini pasti tidak ada karena belum pernah dianggarkan. Paling cepat 2021 kalau bisa dimasukkan dalam proses penyusunan RAPBN 2021," ujarnya.

Isa menjelaskan saat ini sudah mulai dilakukan penelitian dan pengkajian terkait kekuatan dari struktur bangunan Kejaksaan Agung tersebut sebab telah berdiri sejak 1970. Isa menuturkan gedung yang dibangun pada 1970 itu awalnya memiliki nilai sebesar Rp7 juta namun setelah direvaluasi nilainya kini mencapai Rp155 miliar.

Isa melanjutkan jika dihitung dengan renovasi yang pernah dilakukan maka nilai gedung tersebut mencapai Rp161 miliar. "Itu estimasi untuk memberi tambahan berapa kebutuhan anggaran. Sekarang sedang diteliti Kementerian PUPR dan Universitas Indonesia mengenai kekuatan struktur bangunan," katanya.

Isa melanjutkan pihaknya sedang mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk dapat mengasuransikan aset negaranya untuk menghindari terulangnya kejadian yang menimpa Gedung Kejaksaan Agung. "Ini membangun budaya baru, menjaga ketertiban, pemeliharaan, dan pencegahan kebakaran. Pencegahan diutamakan daripada penanganan dampak musibah," tegasnya.

Isa menyebutkan sejauh ini telah ada 10 K/L yang sedang dalam proses untuk mengasuransikan gedungnya, sedangkan seluruh gedung yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dipastikan sudah diasuransikan. "Gedung Kemenkeu semua sudah diasuransikan. Kami baru akan menambah paling sedikit 10 K/L lain untuk bersama-sama mengasuransikan gedung bangunannya," ujarnya. ●bari

Pertumbuhan Ekonomi 2021 Tergantung Perbaikan Kinerja di 2020

NERACA

Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurrahman mengatakan pertumbuhan ekonomi pada 2021 yang diperkirakan pada kisaran 4,5-5,5 persen bergantung perbaikan kinerja pada 2020. "Perkiraan 4,5-5,5 persen itu dengan harapan ada pemulihan, tapi kalau landasan perbaikan ekonomi pada 2020 tidak kuat, maka kita tidak berharap target 2021 dapat tercapai," kata Rizal dalam diskusi Indef di Jakarta, Selasa.

Rizal memastikannya upaya pembenahan ekonomi pada 2021 membutuhkan optimalisasi maupun efektivitas kebijakan fiskal yang dibarengi dengan kebijakan moneter agar kinerja perekonomian bisa berdaya tahan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Salah satu optimalisasi kebijakan fiskal yang harus diupayakan antara lain mempercepat realisasi belanja penanggulangan kesehatan maupun program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang masih rendah.

Pada hal, belanja tersebut dapat bermanfaat untuk mengatasi persoalan kesehatan serta menjaga daya beli masyarakat, dan membantu penguatan konsumsi rumah tangga maupun investasi, yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kita memang optimis terjadi perbaikan, apabila realisasi stimulus fiskal makin efektif, tidak melambat dan tepat sasaran, terutama untuk perlindungan sosial, sektoral, pmda, UMKM, insentif usaha dan tentunya kesehatan," katanya. Dengan kondisi saat ini, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2020 bisa mencapai kisaran minus 0,53 persen hingga 0,14 persen, dengan catatan realisasi belanja stimulus yang dicanangkan pemerintah minimal mencapai 60 persen. ●bari



LABA CIMB NIAGA FINANCE MENINGKAT : Presiden Director PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance) Ristiawan Suherman (tengah) berfoto bersama (kiri ke kanan) Collection & Recovery Director Danis V Bimawan, Credit & Risk Director Antonius Herdaru, Finance & Strategy Director Imron Rosyadi dan Sales & Acquisition Director Kurniawan Kartawinata usai memberi keterangan dalam Paparan Kinerja Perseroan, di Jakarta, Selasa (25/8/2020). Pada semester pertama tahun 2020, CIMB Niaga Finance berhasil membukukan perolehan laba sebelum pajak atau profit before tax (PBT) sebesar Rp166,2 miliar atau naik 8% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp154,1 miliar.

Belanja Negara Mengalami Pertumbuhan 1,3%

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara hingga Juli 2020 tumbuh 1,3 persen (yoy) yaitu sebesar Rp1.252,4 triliun dari Rp1.236,3 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Sri Mulyani mengatakan realisasi Rp1.252,4 triliun tersebut merupakan 45,7 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp2.739,2 triliun.

■ NERACA

"Belanja negara mencapai Rp1.252,4 triliun diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN)," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (25/8). Pertumbuhan belanja negara ditunjang oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp793,6 triliun yang tumbuh 4,2 persen dari periode sama 2019 yakni Rp761,3 triliun dan 40,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp1.975,2 triliun.

Kemudian, belanja barang Rp121,4 triliun atau 44,7 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp271,7 triliun, turut berkontraksi hingga 17 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan sosial dan bekerja dari rumah.

Hal itu membuat realisasi untuk perjalanan turun 62,8 persen yaitu dari Rp21,5 triliun menjadi Rp8 triliun dan kegiatan barang diserahkan kepada masyarakat turun 22,1 persen dari Rp13,2 triliun menjadi Rp10,3 triliun. "Belanja barang yang sifatnya operasional dan nonoperasional juga mengalami penurunan di 24,6 persen. Ini dilakukan untuk yang berkaitan dengan kegiatan K/L akibat tidak ada training dan tidak ada event," katanya.

Belanja modal terealisasi Rp46,8 triliun atau terkontraksi 3,3 persen karena adanya restrukturisasi proyek dalam rangka refocusing penanganan COVID-19. Belanja bantuan sosial tere-

Pengembangan Ekonomi Syariah Perlu Kerja Keras

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memerlukan kerja keras karena indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah yakni di bawah 10 persen.

"Indeks itu mencerminkan bahwa kita perlu bekerja keras untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air," kata Ma'ruf Amin saat menyampaikan pidato pada perayaan Tahun Baru Islam yang diselenggarakan LinkAja secara virtual dari Jakarta, Selasa.

Merujuk pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ma'ruf mengatakan tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 8,93 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 9,1 persen. Angka tersebut cukup rendah mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia.

Untuk meningkatkan kemampuan dan jumlah pengguna jasa keuangan syariah tersebut, Ma'ruf Amin meminta seluruh penyelenggara jasa keuangan syariah untuk memperluas layanannya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

"Dengan indeks yang masih rendah memberikan kita peluang untuk melakukan perluasan layanan keuangan syariah, khususnya menggunakan basis teknologi digital kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia," tukasnya.

Pemerintah juga telah menerbitkan regulasi yang dapat mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional dan Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Tugas dan fungsi KNEKS menjadi semakin luas dengan tidak hanya mengutamakan pada peningkatan aset keuangan syariah, melainkan juga mendorong sektor riil industri halal, kata Ma'ruf.

Oleh karena itu, dengan potensi populasi muslim terbesar serta didukung dengan regulasi dan layanan jasa keuangan syariah berbasis teknologi; Ma'ruf berharap Indonesia dapat menjadi referensi industri halal dan keuangan syariah bagi negara lain. "Kita bercita-cita agar Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah dan industri halal tingkat dunia," ujar Wapres. (Bari)

Pengelolaan Sampah Bisa Buka 120 Ribu Lapangan Kerja Baru

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penerapan ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampah bisa membuka lebih dari 120 ribu lapangan kerja baru.

"Penerapan eko sirkular dalam pengelolaan sampah diharapkan dapat membuka lapangan kerja lebih dari 120 ribu lapangan kerja baru dengan industri daur ulang dan 3,3 juta pekerja informal pendukung," katanya dalam peluncuran Packaging Recovery Organization/PRO Indonesia yang ditayangkan secara daring, Selasa (25/8).

Luhut mengatakan pemerintah saat ini sangat peduli terhadap pengelolaan sampah plastik. Pemerintah bahkan berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang tidak biasa serta menerapkan pendekatan sistem dalam memerangi sampah plastik serta polusi yang ditimbulkannya.

Pemerintah beberapa waktu lalu telah meresmikan program pengolahan sampah dengan metode Refuse Derived Fuel (RDF) di Cilacap, Jawa Tengah. "Kita mau bikin RDF seperti itu 10 lagi di kota-kota yang sampahnya di bawah 200 ton per hari. Karena sampah ini menimbulkan macam dampak penyakit, kesehatan dan sebagainya," katanya.

Luhut mengatakan perlu kolaborasi antara pemerintah, publik, dan swasta dalam upaya menangani masalah sampah plastik di Indonesia. Pemerintah juga menargetkan untuk bisa mengurangi 70 persen sampah plastik pada 2025.

"Pemerintah akan membuat apa saja untuk kita bisa menyelesaikan bersama-sama. Tidak bisa hanya pemerintah, pihak swasta pun terlibat dalam hal ini. Oleh karena itu, saya titip betul ke bapak ibu sekalian, yang sudah mulai ini ayo kita sama-sama menuntaskannya," katanya.

Luhut juga mengingatkan para pimpinan daerah untuk bisa mendukung program penanganan sampah plastik dengan menyiapkan infrastruktur pengumpulan sampah plastik serta melibatkan bank sampah yang sudah terbentuk.

Ia menyebut di seluruh Indonesia terdapat lebih dari 7.000 bank sampah yang berhasil memilah, mengumpulkan dan menjual sampah plastik dalam jumlah yang besar setiap tahunnya.

Dukungan yang dilakukan pemerintah daerah juga dinilai akan membantu membangun ekonomi sirkular. "Bank sampah perlu dibina sebagai salah satu simpul dari ekonomi sirkular sekaligus sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat," katanya. ●bari

Diversifikasi Jadi Instrumen Capai Ketahanan Pangan

NERACA

Jakarta - Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, diversifikasi pangan merupakan salah satu

cara untuk mencapai ketahanan pangan atau food security di Tanah Air. Selama ini, pemerintah selalu fokus untuk mencapai swasembada pangan. Padahal swasembada bukanlah hal yang mudah dicapai mengingat banyaknya faktor pada sektor pertanian Indonesia yang tidak mendukung tujuan tersebut.

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi dimana ketersediaan pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang untuk setiap saat dan setiap individu mempunyai akses untuk memperolehnya, baik se-

cara fisik maupun ekonomi. Ketahanan pangan seringkali dikaitkan dengan ketersediaan pangan, stabilitas pangan dan juga aksesibilitas (keterjangkauan) oleh masyarakat. Ketiga hal inilah yang masih sulit diwujudkan oleh pemerintah.

"Keadaan Indonesia di masa sekarang sangat berbeda dengan Indonesia pada saat sukses mencapai swasembada pangan. Untuk itu pemerintah harus realistis dan melihat adanya kemungkinan untuk menggunakan pendekatan lain, salah satunya adalah diversifikasi pangan. Selain

itu, sudah tentu dengan mendukung kebijakan perdagangan terbuka (open trade) untuk pangan sehingga masyarakat memiliki akses kepada pangan bergizi dengan harga terjangkau," ungkapnya, sebagaimana dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Felippa menambahkan, diversifikasi pangan bisa menjadi pilihan daripada hanya fokus pada satu jenis komoditas pangan saja. Namun diversifikasi pangan tidak akan terwujud kalau pemerintah tetap menjadikan swasembada sebagai tujuan utama. ●bari

PT PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA ACQUISITION ANNOUNCEMENT	PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN PT PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA
<p>PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera, a limited liability company domiciled in North Jakarta, Indonesia ("Company"), hereby announcing that the Company will be acquired directly by PT Family Medika Investama ("FMI") (hereinafter referred to as the "Acquisition Plan").</p> <p>For all the creditors objecting to the Acquisition Plan, may submit a written objection to the Company within 14 (fourteen) days since this announcement date by stating the reasons and supporting evidence to the Company at the address: Jl. Pluit Mas Blok A 2A-5A, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, North Jakarta, on working days and hours. The Acquisition Plan will be available on the Company's address above.</p> <p>This announcement is made to comply with the provisions in Article 127 paragraph (2) Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (the "Company Law").</p> <p>Acquisition Plan Summary</p> <p>(A) Acquisition Plan background and basis The Acquisition Plan is a form of agreement to directly acquire the Company through its shareholders.</p> <p>(B) Acquired party statement The Company is established under the laws of the Republic of Indonesia with purposes and objectives (among others) to mainly engage in the field of private hospital activities.</p> <p>(C) Acquiring party statement FMI is a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled at South Jakarta, and having its office address at Equity tower 35th floor, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta.</p> <p>(D) Funding FMI shall provide sufficient funds to pay the price of the Acquisition Plan.</p> <p>(E) Settlement of the rights of Shareholders who do not approve the Proposed Acquisition In accordance with Article 126 paragraph (2) of Company Law, the other shareholders may state their disagreement towards the general meeting of shareholders, and may exercise their rights in accordance with Article 62 of Company Law.</p> <p>(F) The Board of Directors and Board of Commissioners after the Acquisition Plan The change of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners after the Acquisition Plan is conducted, shall be done in accordance with the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.</p> <p>(G) Right of first offer In relation to the Acquisition Plan, any non-selling shareholders of the Company wishing to exercise its right of first offer under the Articles of Association of the Company, may inform the selling shareholders of the Company and the Company by no later than 30 days since the date of this announcement, by observing and in accordance with further terms and conditions as available at the Company's office and may be obtained from the President Director of the Company during business day and within working hours within such 30 days period.</p> <p>Jakarta, 26 August 2020 / 26 Agustus 2020</p> <p>Direksi PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera</p>	<p>PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta Utara, Indonesia ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan diambil alih secara langsung oleh PT Family Medika Investama ("FMI") (selanjutnya disebut juga sebagai "Rencana Pengambilalihan").</p> <p>Bagi para kreditor yang keberatan atas Rencana Pengambilalihan tersebut, dapat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dengan menyebutkan alasan dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung kepada Perseroan di alamat: Jl. Pluit Mas Blok A 2A-5A, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada hari dan jam kerja. Rancangan Pengambilalihan tersedia di alamat kantor Perseroan tersebut di atas.</p> <p>Pengumuman ini dibuat untuk mematuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").</p> <p>Ringkasan Rancangan Pengambilalihan</p> <p>(A) Latar belakang dan dasar Rencana Pengambilalihan Rencana Pengambilalihan merupakan bentuk kesepakatan untuk melakukan pengambilalihan Perseroan secara langsung melalui para pemegang saham.</p> <p>(B) Keterangan pihak yang diambillalih Perseroan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan maksud dan tujuan (antara lain) untuk terutama bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta.</p> <p>(C) Keterangan pihak yang mengambillalih FMI adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan maksud dan tujuan (antara lain) untuk terutama bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta.</p> <p>(D) Pendanaan FMI akan menyediakan dana yang cukup untuk membayar harga Rencana Pengambilalihan.</p> <p>(E) Penyelesaian hak-hak Pemegang Saham yang tidak menyetujui Rencana Pengambilalihan Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (2) UUPT, pemegang saham lainnya dapat menyatakan ketidak setujuannya terhadap keputusan rapat umum pemegang saham, dan dapat menggunakan hak mereka sesuai ketentuan Pasal 62 UUPT.</p> <p>(F) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah Rencana Pengambilalihan Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah Rencana Pengambilalihan akan dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(G) Hak untuk menerima penawaran pertama Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan, setiap pemegang saham Perseroan yang tidak menjual yang bernakut untuk melaksanakan hak untuk menerima penawaran pertamanya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, dapat memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan yang menjual dan Perseroan dalam waktu tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal pengumuman ini, dengan mematuhi dan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan lebih lanjut yang tersedia pada kantor Perseroan dan yang dapat diperoleh melalui Direktur Utama Perseroan pada hari dan jam kerja dalam jangka waktu 30 hari tersebut.</p> <p>Jakarta, 26 Agustus 2020</p> <p>Direksi PT Family Medika Investama</p>

PENGUMUMAN

Direksi **PT. MILLENNIUM GOLDEN LINK** berkedudukan di Jakarta Pusat (Perseroan) dengan ini mengumumkan kepada Para Kreditor Perseroan sesuai hasil Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Agustus 2020, telah menyetujui:

- Akan dilakukan pengambilalihan mayoritas saham pada Perseroan
- Penurunan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 20.000.000.000,- menjadi Rp. 500.000.000,- dan Modal Ditempatkan/Disetor dari Rp. 10.000.000.000,- menjadi Rp. 250.000.000,-

Apabila terdapat keberatan dari Para Kreditor Perseroan atas pengambilalihan mayoritas saham dalam perseroan dan pengurangan modal tersebut dapat menyampaikan secara tertulis disertai alasannya kepada Direksi Perseroan ke alamat:

Jalan Kwitang Raya No.1, Rt.001/Rw.007, Kel.Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat,

dengan tembusan kepada Menteri Hukum & HAM RI dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 dan Pasal 127, UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 26 Agustus 2020
Direksi Perseroan

PT. MITRA ENERGI PERSADA, TBK. ("Perseroan")

RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Mengacu pada Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebelumnya yang telah diumumkan pada website OJK, IDX, KSEI dan website Perseroan, serta terdapat di Harian Neraca, 3 Agustus 2020, dan juga Pengumuman Pemberitahuan Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 25 Agustus 2020 pada semua media yang sama. Dengan ini, Direksi Perseroan menyampaikan Ralat Pemanggilan atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 September 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : SOTIS Hotel Kemang, Jl. Kemang Raya No.4 Jakarta Selatan

Pemanggilan Rapat dapat di baca selengkapnya pada website Perseroan, website OJK, website IDX dan website KSEI. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.

Jakarta, 26 Agustus 2020
PT MITRA ENERGI PERSADA, Tbk
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN/ATAU PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH ARDHANI

PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana Syariah BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani ("BNI-AM Syariah Ardhani"), bermaksud menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan/atau Prospektus BNI-AM Syariah Ardhani dengan rincian perubahan sebagai berikut:

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
- Komite Investasi
- Perubahan fitur minimum pembelian awal dan selanjutnya, dan minimum penjualan kembali
- Penyesuaian Peraturan OJK

Rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus Reksa Dana tersebut di atas telah diberitahukan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal yang sama dengan pengumuman ini. Rincian mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus Reksa Dana tersedia di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 26 Agustus 2020

BNI
Asset Management

PT. BNI ASSET MANAGEMENT
Centennial Tower, 19th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 24 & 25, Jakarta 12390
Telepon (62-21) 2996 9646 • Faksimile (62-21) 2996 9647
Email: customerservices@bni-am.co.id
www.bni-am.co.id

PT. BNI Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PENGUMUMAN

Diumumkan kepada Nasabah bahwa PT BPR LUGANO (DL) lokasi Jl. Sawo d'ih Raya Setu No.41/7 Kel. Bantar Gebang Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2009. Dengan terbentuknya Tim Likuidasi (TL) tanggungjawab penyelesaian aset dan kewajiban dilaksanakan oleh Tim Likuidasi. Para Debitor dapat melaksanakan kewajibannya kepada Tim Likuidasi dan para Kreditor diminta mendaftarkan tagihannya kepada Tim Likuidasi paling lambat 60 hari sejak tanggal pengumuman ini. Terkait laba cara pendaftaran tagihan, Kreditor dapat menghubungi Tim Likuidasi pada alamat tersebut diatas setiap hari kerja.

Bekasi, 26 Agustus 2020

Tim Likuidasi
Yayah Heryatun Saminu
Ketua Anggota

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pemberesan harta kekayaan Perseroan dan dengan melihat tidak adanya tagihan dari Kreditor manapun, maka Likuidator memutuskan untuk membagikan kekayaan hasil likuidasi Perseroan ini, paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini. Pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta 26 Agustus 2020.
Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN

Telah dibubarkan PT.KREASI INTI REMAJA, berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.44 Tgl. 18 Agustus 2020 yang dibuat Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn, Notaris di Depok. Likuidator SUMIATI, Ji.Utama IV No.20 Kel. Cengkareng Kec.Cengkareng Barat, Jakarta Barat, No.Telp 08138008323 Kreditor dapat menghubungi alamat dan nomor di atas dalam waktu 60 hari sejak pengumuman ini.

Td, Direksi,
PT.KREASI INTI REMAJA

PENGUMUMAN

Berdasarkan Pasal 149 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diberitahukan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi (bersih) **PT KINO MALEK INDONESIA** (dalam Likuidasi), berkedudukan di Kota Tangerang ("Perseroan"), yaitu dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional setelah memperhitungkan kewajiban pembayaran Perseroan.

Kota Tangerang, 26 Agustus 2020
Likuidator Perseroan